

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-3 Bulan Februari 2021

(tanggal 12 s.d. 18 Februari 2021)

VAKSINASI COVID-19 DAN PENANGANAN LIMBAHNYA



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Sri Nurhayati Qodriyatun
Peneliti Madya/Kebijakan Lingkungan
Sri.qodriyatun@dpr.go.id



ISU ATAU PERMASALAHAN

- Kondisi penularan kasus covid di Indonesia masih cukup tinggi. Laporan Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan dalam sepekan rasio tes positif di Indonesia adalah 28,2 %. Bahkan, pada 16 Februari rasio tes positif nasional mencapai 38,3%. WHO menyatakan bahwa rasio tes positif Covid-19 lebih dari 20% menandai penularan kasus di komunitas dalam skala tertinggi. Di sisi lain, tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan (menjaga jarak dan memakai masker) kurang dari 85%. Meskipun diberlakukan PPMK, nyatanya tidak semua provinsi di Jawa dan Bali memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.
- Salah satu upaya Pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan vaksinasi massal secara nasional yang targetnya akan menjangkau 181,5 juta penduduk Indonesia hingga 2022 mendatang. Tujuannya untuk menurunkan angka kasus kematian dan kasus positif Covid-19, mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, mencapai kekebalan kelompok, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta melindungi dan memperkuat sistem kesehatan menyeluruh. Strateginya dilakukan berdasarkan klaster, menambah tenaga vaksinator, menambah tenaga vaksinasi dengan penggunaan fasilitas umum, memperkuat manajemen pelaksanaan vaksinasi di daerah, dan menambah jumlah vaksin di Indonesia.
- Vaksin dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang I (13 Januari – April 2021) sasarannya 1,46 juta petugas kesehatan yang tersebar di 34 provinsi, 16,9 juta pekerja publik, dan 21,5 juta manula, prioritas di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pekerja publik yang dimaksud adalah pendidik (guru dan dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, dan pemadam kebakaran), petugas transportasi publik, atlet, wartawan, dan pelaku sektor pariwisata (staf hotel, restoran, dan tempat wisata). Gelombang II (April 2021 – Maret 2022) direncanakan menjangkau 63,9 juta masyarakat rentan (masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi) dan 77,7 juta masyarakat lainnya yang akan dilakukan dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
- Vaksin yang digunakan adalah vaksin dari PT. Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd, dan Novavax. Untuk mendukung Program vaksinasi memprioritaskan penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri, antara lain: masker bedah, masker medis (N95), GeNose, Vaksin Merah Putih (sedang dalam proses pengembangan, ditargetkan diproduksi massal kuartal III 2022), masker kain, pakaian bedah, dan pakaian pelindung medis.
- Pelaksanaan vaksin didukung dengan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dasar hukumnya SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informasi No. HK.03.01/Menkes/53/2021 dan No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Satu Data Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menghasilkan peningkatan limbah medis. Data pemerintah menyebutkan limbah medis sejak awal pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia telah mencapai 7.502.79 kg dan kemungkinan akan bertambah dengan adanya pelaksanaan vaksinasi massal. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 KLHK memperkirakan akan ada potensi limbah medis bertambah sebesar 7.578.800 kg dari kegiatan vaksinasi massal. Saat ini masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tidak mengolah limbah medisnya dengan maksimal. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengakui pengelolaan limbah fasyankes masih terkendala, baik dari aspek regulasi, kapasitas pengolahan, dan peran pemerintah daerah.
- Limbah medis selama pandemi Covid-19 tidak hanya berasal dari fasyankes. Akan tetapi, juga dari sampah masyarakat berupa masker, sarung tangan bedah, dan berbagai alat pelindung diri penderita Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. Selama ini limbah medis tersebut masuk di sampah rumah tangga yang penanganannya sebagaimana sampah rumah tangga umumnya dilakukan, dan hal tersebut dapat membahayakan bagi lingkungan karena bahan berbahaya dan beracun yang terkandung dalam limbah tersebut.

FUNGSI DPR

Pengawasan:

- DPR melalui Komisi IX perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar tepat sasaran dan mematuhi protokol kesehatan; memastikan ketersediaan vaksin; dan mendorong Pemerintah melakukan sosialisasi vaksin Covid-19 ke masyarakat.
- DPR melalui Komisi IV perlu melakukan pengawasan terhadap penanganan limbah medis, baik yang ada di fasyankes ataupun limbah medis yang ada di masyarakat; dan mendorong Pemerintah untuk mengedukasi atau memberikan sosialisasi dalam penanganan limbah medis yang ada di masyarakat.

Anggaran:

DPR melalui Komisi IV meminta Pemerintah untuk menyediakan alokasi anggaran untuk penanganan limbah medis, terutama untuk penambahan fasilitas pengolah limbah medis dan mengedukasi masyarakat dalam menangani limbah medisnya.

ATENSI DPR RI

- DPR melalui Komisi IX perlu meminta penjelasan mengenai upaya sudah dilakukan Pemerintah terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.
- DPR melalui Komisi IV perlu meminta penjelasan mengenai upaya penanganan limbah medis (terutama limbah medis pasca vaksinasi Covid-19 dan limbah medis yang ada di masyarakat) dan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

SUMBER

- "Protokol Kesehatan Belum Banyak Dipatuhi", Kompas, 18 Februari 2021, hal. 12.
- "Vaksinasi Pekerja Publik Dimulai", Republika, 18 Februari 2021, hal. 1.
- "Imbangi Vaksinasi dengan Patuhi Protokol Kesehatan", Kompas, 18 Februari 2021, hal. 1.
- "LIPI Upayakan Solusi Limbah Medis", Republika, 18 Februari 2021, hal. 2.
- "Kejar Target Rampungkan Vaksinasi Akhir 2021", Media Indonesia, 18 Februari 2021, hal. 6.
- "Vaksinasi Tahap Kedua bagi Pekerja Publik dan Manula", Media Indonesia, 18 Februari 2021, hal. 8.
- "Pemerintah Prioritaskan Alkes Dalam Negeri pada Program Vaksinasi", Media Indonesia, 17 Februari 2021, hal.13.
- "Fasilitas Kesehatan Abaikan Penanganan Limbah Medis", Media Indonesia, 17 Februari 2021, hal. 1.
- "Masker Bekas Masih Bisa Didaur Ulang", Kompas, 17 Februari 2021, hal.8.
- "9 Juta Orang Segera Disuntik Vaksin", Kompas, 16 Februari 2021, hal. 1.
- "Limbah Medis Mengancam", Media Indonesia, 16 Februari 2021, hal. 1.
- "Masyarakat Harus Terlibat Pengelolaan Limbah Masker", Republika, 16 Februari 2021, hal. 12.
- "Menko PMK Akui Pengelolaan Limbah Medis Masih Terkendala", *medcom.id*, 18 Februari 2021, diakses dari Menko PMK Akui Pengelolaan Limbah Medis Masih Terkendala - Medcom.id